

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan sesuai dengan jenis dan jenjangnya masing-masing. Pendidikan tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Pendidikan merupakan sarana strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Penyelenggaran pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, dalam artian, bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu faktor yang, mempengaruhi penyelenggaraan adalah pembiayaan.

Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan

misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. sekolah sebagai salah satu unit operasional pendidikan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Konstitusi amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD selain gaji guru agar mutu dan pemerataan pendidikan dapat lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah memerlukan adanya standar nasional bidang pendidikan. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan pengaturan standar nasional pendidikan sekaligus merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan

pendidikan di setiap sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.

Daryanto mengatakan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Dinamika pendidikan dilihat dari segi pembiayaan pendidikan berhubungan dengan: a) Jumlah pembiayaan sekolah swasta; b) Penggajian staf pengajaran; c) Pembiayaan dan penerimaan pendapatan; dan d) Kembalian dari pembiayaan pendidikan yang meningkat.<sup>1</sup>

Menurut Indiyanto menyatakan bahwa kebijakan pendidikan masih diarahkan pada empat tema kebijakan, yaitu peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi pendidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Daryanto. *Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1-2.

<sup>2</sup> Indriyanto, B. (2001), Sumber Daya Pendidikan : Reaktualisasi Pasal 1 (Ayat 10) Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan. Manajemen biaya pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Beragam sumber yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang profesional dan jujur. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua kalangan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 80 ayat 1 yang berbunyi, ”anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara”.<sup>3</sup> Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Sehingga, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu

---

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah  
<http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/2008/48TAHUN2008PP.htm> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal.

Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan.

Berbagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tetap saja biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai harapan. Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang

bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.

Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidak mampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanat-kan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8,

yang disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” serta pasal 9 yang berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.<sup>4</sup> Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orangtua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orangtua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen biaya penunjang, yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran.

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah- sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah- sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

masyarakatnya. Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU sampai menambah/memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk, membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan.

Terlebih di sekolah swasta, meskipun sudah mendapat dana BOS namun untuk menunjang operasional yang lain orang tua tetap memberikan dana tiap bulannya (SPP). Menurut *Wijaya* dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Implikasi Manajemen Keuangan sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan" menerangkan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan, tetapi dalam prakteknya sekolah swasta hanya mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih kecil daripada sekolah negeri.<sup>5</sup>

Selain itu, mekanisme penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dan sekolah negeri sangat berbeda. SD Islam Tarbiyatul Falah Blitar merupakan salah satu sekolah swasta yang maju di kota Blitar. Selain maju, kelebihan yang dimiliki . SD Islam Tarbiyatul Falah Blitar yaitu, tenaga

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD



pendidik di sekolah tersebut terbilang kompeten karena rata-rata tenaga pendidik telah memiliki gelar SI. Dalam mengatur pembiayaan sekolah SD NU lebih cenderung menggunakan SPP dari wali murid walau ada dana BOS. Dalam pengelolaannya bendahara sekolah bekerjasama dengan bendahara yayasan untuk operasional sekolah. Untuk SD Islam Lukmanul Hakim dari sisi statusnya, yakni sekolah swasta yang jelas mungkin sama dengan sekolah- sekolah yang lain, namun sekolah ini punya sisi yang unik dan berbeda dari sisi yang lain. SD Islam Lukmanul hakim punya kelas unggulan “Cambrige” dan ICT, yang jelas akan menuntut pembiayaannya yang berbeda dengan yang kelas-kelas regular.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di SD Islam Tarbiyatul Falah BlitarKediri Sehingga dalam hal ini, penulis mengajukan judul penelitian, yaitu Manajemen Pembiayaan Pendidikan di sekolah Swasta (Studi multi situs di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah dari masalah yang masih bersifat umum.<sup>6</sup> Pembatasan didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 286.

masalah yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar?
2. Bagaimanana pengorganisasian/ pengelolaan pembiayaan pendidikan SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar?
3. Bagaimana pengawasan/ kontroling pembiayaan pendidikan SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengindikasikan maksud penelitian, dan bukan masalah atau isu yang dapat menuntun pada keharusan diadakannya penelitian, tujuan penelitian bukanlah rumusan masalah yang didalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang nantinya dijawab berdasarkan data-data penelitian yang telah dikumpulkan. Akan tetapi tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksudmaksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.

Gagasan ini dibangun berdasarkan suatu kebutuhan (masalah penelitian) dan diperhalus kembali dalam pernyataan yang spesifik ( rumusan masalah). Tujuan penelitian akan menggambarkan tujuan-tujuan /maksud dilakukannya penelitian. Begitu pentingnya tujuan penelitian ini, sehingga peneliti perlu menuliskan secara terpisah dari aspek- aspek lain

yang perlu membingkainya dalam satu kalimat yang mudah dipahami.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mendiskripsikan perencanaan pembiayaan pendidikan di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar.
2. Untuk Mendiskripsikan pengorganisasian/ pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar.
3. Untuk Mendiskripsikan pengawasan/ kontroling pembiayaan pendidikan SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, adanya uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu pendidikan, khususnya mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia yang ideal untuk sekolah dasar.

- b. Memberikan konsep tentang pembiayaan pendidikan di SD yang ideal.
- c. Memberikan tuntunan dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan di sekolah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang ideal tentang kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengawasan pembiayaan pendidikan SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar.
- b. Untuk mendapatkan gambaran tentang desain pembiayaan pendidikan di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar.
- c. Bagi SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar dan Kemenag Kota Kediri dan Blitar sebagai masukan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui penataan manajemen pembiayaan pendidikan yang ideal di sekolah.
- d. Bagi Komite sekolah sebagai masukan dalam meningkatkan partisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran pendidikan pada madrasah untuk mendorong peningkatan mutu peserta didik.

- e. Hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dan pemberi data untuk dipraktikkan di lembaga pendidikan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, telah ada beberapa penelitian sejenis tetapi berbeda dalam sudut pandang dan kajiannya, berikut penelitian terdahulu yang dapat di dokumentasikan.

1. Luluk Aryani Isusilaningtyas<sup>7</sup> menyimpulkan dalam hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama: Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu guru, yaitu menekankan pada profesionalisme dan disiplin, serta komitmen tugas untuk meningkatkan mutu sekolah. Kedua: Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya pembinaan siswa dilakukan melalui pembinaan dibidang seni, olah raga, keagamaan, pramuka, bahasa Inggris, dan kepribadian. Keempat: Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sumber pembiayaan, menjalankan program peningkatan mutu untuk mendukung sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru.

---

<sup>7</sup> Luluk Aryani Isusilaningtyas menjelaskan dalam tesisnya yang berjudul: Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Pembiayaan (Studi Kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang) Tesis tidak diterbitkan.

2. M. Jupri, menyimpulkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP N 2 RSBI Rembang, dalam proses pembiayaan pendidikan melibatkan banyak pihak, pencatatan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan telah sesuai dengan data. Pengawasan dan pertanggungjawaban dilaksanakan melalui audit internal dan eksternal sekolah. Disarankan sekolah dapat melibatkan pengurus osis dalam tim sekolah untuk mendapatkan usulan yang berkenaan dengan kebutuhan siswa dalam anggaran sekolah. sekolah memiliki ahli IT untuk membantu mengelola sistem informasi dan keuangan sekolah, pemerintah kabupaten dapat membuat standar iuran masyarakat untuk RSBI/SBI agar pembiayaan bisa transparan. Dalam alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan ,tim penyusun anggaran sekolah di bentuk sebelum tahun pelajaran berjalan. Rancangan anggaran dikonsultasikan ke dinas pendidikan kab Rembang, selanjutnya dimintakan persetujuan komite sekolah sebagai perwakilan orangtua dinas pendidikan dan pengesahan dari dinas pendidikan agar RAPBS menjadi APBS.
3. Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama

pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.<sup>8</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini peneliti menyusun sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas dari masing-masing bab yang saling berhubungan antar bab satu dengan bab yang lain.

Penelitian ini dibagi menjadi enam bab utama yang diawali dengan pendahuluan dan ditutup dengan pokok-pokok kesimpulan.

### **1 BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan, penulis menyajikan sebagian pengantar Tesis yang mutlak harus dipahami, agar pembahasan dalam Tesis dapat dimengerti dengan tepat dan sistematis, sehingga dalam sub bab ini akan diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan

---

<sup>8</sup>Ulpha Lisni Azhari1 Dedy Achmad Kurniady, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah* Jurnal, Universitas Pendidikan Indonesia, Administrasi Pendidikan Vol.XXIII No.2 Tahun 2016.

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

## 2 **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Pada bab landasan teori, dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain: Pertama, tinjauan tentang pondok pesantren yang meliputi konsep manajemen pembiayaan dan pembiayaan pendidikan

## 3 **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

## 4 **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang terdiri dari Paparan data yang meliputi: perencanaan pembiayaan pendidikan di SD Islam



Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar. Pengorganisasian/ pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar. Pengawasan/ kontroling pembiayaan pendidikan SD Islam Tarbiyatul Falah Kota Blitar dan SD Islam Lukmanul Hakim Blitar.

## 5 **BAB V**

### **ANALISIS**

Merupakan penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

## 6 **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis dan saran.